

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta; Akademika Pressindo, 1993.
- Andi Hamzah, 2005. Hukum Acara Pidana, Jakarta. Sinar Grafika.
- Adami Chazawi. 2005. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang. Bayu Media.
- . 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta. PT Raja Grafindo.
- . 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- Abdul Wahid, Dkk. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual. Bandung. PT Refika Aditama.
- Anton F. Susanto. 2004. Wajah Peradilan Kita. Bandung. PT Refika Aditama.
- . 2005. Semiotika Hukum. Bandung. PT Refika Aditama.
- Amir Syamsudding. 2003 Menanti Kehadiran Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Artikel Jurnal keadilan. Vol 3 No. 2
- Barda Nawawi Arief. 2003. Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Dikdik M. arief Mansur, Dkk. 2007. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Darwan Prinst. 2002. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Dina Zenitha. 2006 Mengenal Perlindungan saksi di Jerman (seri kampanye Perlindungan saksi dan korban Indonesia Corruption Watch). Penerbit Indonesia Corruption Watch,
- Emeritus John Gilissen Dkk. 2007. Sejarah Hukum Suatu Pengantar. Bandung. PT Refika Aditama.
- Elsam. 2005 Saksi dalam Ancaman ; Dokumentasi kasus, Seri Kampanye Perlindungan Saksi dan Korban No. 4.

- . Perlindungan Saksi dan Korban, catatan atas pengalaman Pengadilan Ham Ad Hoc kasus Pelanggaran Ham berat di Timor-timur, Lembaga Studi Advokasi masyarakat, Jakarta.
- Evi Hartanti. 2006. Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sinar Grafika.
- E. Fernando M. Manullang. 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Anatomi Nilai. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.
- Franck. 1972. American Law and Legal Institution, Wisconsin. Law and Review Press.
- H.M.A Kuffal. 2005. Penerapan KUAHP dalam Praktik Hukum. Malang. UMM Press.
- H. R. Otje Salman & Anton F Susanto. 2004. Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali. Bandung. PT Refika Aditama.
- Muladi. 2007. Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Bandung. PT Refika Aditama.
- Munir Fuady. 2006. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Edisi 2, Jakarta. Sinar Grafika.
- Parman Soeparman. 2007. Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum peninjauan Kembali dalam perkara Pidana Bagi korban Kejahatan. Bandung. PT Refika Aditama.
- Philippe Nonet & Philip Selznick. 2007. Hukum responsif. Bandung. Nusamdia Studio.
- R. Abdussalam & DPM Sitompul. 2007. Sistem Peradilan Pidana. Jakarta. Restu Agung.

- Ronny Rahman Nitibaskara. Tegakan Hukum gunakan Hukum. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara
- Ruswiati Suryasaputra. 2006. Perlindungan Hak Asasi Bagi kelompok Khusus terhadap Diskriminasi dan Kekerasan. Jakarta. PTIK Press & Restu Agung.
- Soeharto. 2007. Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung. PT Refika Aditama.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Hukum, Paradigma, Metode dan Masalahnya, Jakarta. ELSAM dan HUMA.
- Satjipto Rahardjo. 2006. Membedah Hukum Progresif. Jakarta. Kompas
- Supriadi Widodo Eddyono. 2006. Saksi Sosok yang Terlupakan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Koalisi perlindungan Saksi dan Elsam.
- Theo Huijbers. 1982. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta. Kanisius

UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

PERATURAN PEMERINTAH

- PP. No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

PP. No. 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam
Pelanggaran Ham Berat